

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan
Di Samsat Malingping)

Anisa Nurparydatu Syiam¹, Ani Kusumaningsih²

¹Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Pamulang

²Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Pamulang

*Penulis Korespondensi: anisanps09@gmail.com¹, dosen02113@unpam.ac.id²

Abstract. *This study aims to analyze the influence of tax knowledge and the modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance, with tax sanctions serving as a moderating variable at SAMSAT Malingping. The study employs a quantitative method using primary data collected via questionnaires from 100 taxpayers selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using SPSS version 27, involving classical assumption tests, multiple linear regression, Moderated Regression Analysis (MRA), t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The results indicate that tax knowledge has a positive effect on taxpayer compliance, whereas the modernization of the tax administration system does not. Tax sanctions moderate the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance but do not moderate the relationship between the modernization of the tax administration system and taxpayer compliance. Simultaneously, tax knowledge, the modernization of the tax administration system, and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance.*

Keywords: *Knowledge, Administrative Modernization, Taxpayer Compliance, Tax Sanctions*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di SAMSAT Malingping. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner kepada 100 wajib pajak menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 27 dengan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, Moderated Regression Analysis (MRA), uji t, uji f serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif. Sanksi pajak mampu memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak tidak mampu memoderasi hubungan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pengetahuan, Modernisasi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia yang tersebar di 38 provinsi, di mana pajak memegang peranan krusial sebagai kontribusi wajib untuk mendukung kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendanaan pembangunan

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat Malingping)

daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dibandingkan retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Di Provinsi Banten, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi komponen utama penerimaan pajak daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan kepatuhan yang signifikan, sebagaimana tercermin dari tingginya angka tunggakan kendaraan bermotor. Fenomena di wilayah Banten selatan, khususnya di SAMSAT Malingping, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, bahkan di beberapa kecamatan mencapai 50% los pajak. Kondisi ini menuntut perhatian khusus karena efektivitas penerimaan daerah sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Virgiawati dkk. (2019) dan Putra & Merkusiwati (2018) menyoroti pentingnya faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, persepsi sanksi, dan sistem administrasi perpajakan. Terkait variabel pengetahuan pajak, Ilhamsyah dkk. (2016) serta Chusaeri dkk. (2017) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sejalan dengan itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan juga dianggap krusial, di mana Sarunan (2015), Prananti & Rasmini (2014), serta Putra & Merkusiwati (2018) menyimpulkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Begitu pula dengan penerapan sanksi pajak yang dinilai sebagai alat penting untuk meminimalisir penunggakan (Alfianto, 2024), yang didukung oleh temuan Susilawati & Budiarta (2013), Ilhamsyah dkk. (2016), dan Paramartha & Rasmini (2016).

Meskipun telah banyak kajian mengenai kepatuhan pajak, terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian (research gap) yang menjadi urgensi dilakukannya penelitian ini. Misalnya, Wardani dkk. (2017) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan, berbeda dengan temuan Ilhamsyah dkk. (2016). Demikian pula mengenai modernisasi sistem administrasi yang menurut Damayanti & Amah (2017) tidak berpengaruh signifikan, serta sanksi pajak yang oleh Wardani & Asis (2017) dinyatakan tidak berpengaruh signifikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan SAMSAT Malingping sebagai objek penelitian yang memiliki karakteristik unik dengan potensi dan tunggakan yang perlu dianalisis secara spesifik di tengah upaya pemerintah

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

*(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat
Malingping)*

daerah meningkatkan kepatuhan melalui berbagai inovasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD SAMSAT Malingping.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori *Atribusi* menurut Ivancevic *et.al* (2007) “mengungkapkan bahwa secara singkat bagaimana persepsi individu terhadap sebuah peristiwa apakah itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa teori ini membahas mengenai proses dimana individu menginterpretasikan peristiwa yang terjadi yang diakibatkan oleh lingkungan mereka”.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan menjelaskan perilaku individu dalam menaati aturan atau regulasi yang berlaku. Menurut Milgram (1963) “kepatuhan merupakan bentuk perilaku individu yang didorong oleh adanya otoritas atau aturan yang harus diikuti. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak” (Lutfi & Sari, 2026).

Definisi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Oki & Dani, 2018).

Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

*(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat
Malingping)*

yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah (Riswanto dkk., 2017).

Definisi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (*e-SPT*) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi *On-Line Payment* untuk pembayaran pajak. Indikator pengukuran untuk variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan) ini meliputi: struktur organisasi, implementasi pelayanan kepada PKP, strategi organisasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan budaya organisasi (Lasnofa, 2014).

Menurut Rahayu (2010) “modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak, juga pentingnya dilakukan untuk menuju paradigma perpajakan” (Maulana & Yulianti, 2022).

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2010:138) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dari pendapat ketiga para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

*(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat
Malingping)*

perpajakan, dimana wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya serta menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar (Saputra & Nurmantu, 2018).

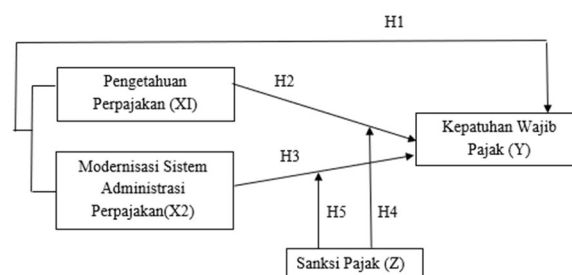
Menurut James et all (1999:14) bahwa “kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku” (Sugiyarti, 2017).

Definisi Sanksi Pajak

Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidak patuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan (Putra, 2020).

Mardiasmo (2011:59) “menjelaskan bahwa sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku” (Ilhamsyah ., 2016). Terdapat dua jenis sanksi menurut Mardiasmo (2018) “yang pertama sanksi administrasi merupakan sebuah sanksi dalam bentuk pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan yang kedua yaitu sanksi pidana, merupakan suatu sanksi berupa hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi” (Adawiyah dkk., 2023).

Kerangka Berfikir



Keterangan:

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat Malingping)

H1 : Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H2 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H3 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H4 : Sanksi Pajak Dapat Memoderasi Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H5 : Sanksi Pajak Dapat Memoderasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dikenal sebagai metode tradisional karena telah lama diterapkan dan menjadi kebiasaan dalam berbagai penelitian ilmiah. Disebut kuantitatif karena data yang dikumpulkan berbentuk angka analisis dengan teknik statistik. Menurut Sugiyono (2018:15) disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Menurut Siregar (2016:107) “prosedur pemecahan masalah pada metode penelitian deskriptif adalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan” (Imron, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Kabupaten Lebak di Kantor SAMSAT Malingping. Teknik purposive sampling, yakni pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara statistik guna mengukur hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat Malingping)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	47	47%
Laki-laki	53	53%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah diolah penulis (2026)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa jumlah responden wajib pajak Kendaraan Bermotor laki-laki yang terdaftar di Samsat Malingping adalah 53 responden dari 100 responden dengan persentase 53%, dan untuk responden Perempuan adalah 47 responden responden dari 100 responden dengan persentase 47%. Dengan demikian, mayoritas responden berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki dengan total 53 responden atau 53%.

Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Umur	Jumlah	Presentase
20 – 30	63	63%
31 - 40	18	18%
41 – 50	7	7%
>51	12	12%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Malingping dengan rentang usia 20 – 30 tahun mencapai 63 orang dari total 100 responden, yang setara dengan persentase sebesar 63%. Sementara itu, responden dengan usia 31-40 tahun berjumlah 18 orang atau 18% dari total responden, dan responden dengan usia 41-50 tahun berjumlah 7 orang atau 7%. Terakhir, terdapat 12 orang responden yang berusia di atas 51 tahun, yang mewakili 12% dari total responden. Dengan demikian, kelompok usia yang paling banyak menjalin responden adalah mereka yang berusia 20-30, dengan persentase 63%.

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat Malingping)

Responden Berdasarkan Lokasi

Tabel 4. 4 karakteristik responden berdasarkan Lokasi secara wilayah kabupaten serta kecamatan

No	Wilayah / Kelurahan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak	58	58%
2.	Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak	42	42%
Total		100	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa jumlah lokasi wilayah responden dalam penelitian ini pada wilayah kecamatan Malingping sebesar 58% sedangkan pada kecamatan Bayah sebesar 42%. Dengan demikian lokasi wilayah yang paling banyak yaitu lokasi pada wilayah kecamatan malingping sebesar 58%.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

**Tabel 4. 16
Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855 ^a	.730	.722	1,818

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak_Z, Pengetahuan_Perpajakan_P1, Modernisasi_Sistem_Administrasi_Pajak_P2

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Pemakaian_Y

Sumber: Data diolah oleh output SPSS

Dari hasil tabel 4.16 pada *Adjusted R Square* dengan nilai 0,722. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 72,2% sedangkan 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang berada diluar model dan tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

**Tabel 4. 11
Moderating Regression Analysis (MRA)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,715	,841		15,118	,000
	Pengetahuan_Pemakaian*Sanksi Pajak	,013	,002	,790	6,485	<,001
	Modernisasi sistem administrasi pemakaian*sanksi pajak	,001	,003	,062	,513	,609

Sumber: Data diolah oleh output SPSS

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat Malingping)

Berdasarkan tabel 4.11 hasil Uji Analisis Regresi Moderated di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 6,485 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($6,485 > 1,984$), dan nilai signifikan variabel interaksi antara variabel Sanksi Pajak (Z) terhadap Pengetahuan Perpajakan (P1) lebih kecil dari 0,001 yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis (H_0) ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (Z) mampu memoderasi hubungan antara variabel Pengetahuan Perpajakan (P1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan tabel 4.11 hasil Uji Analisis Regresi Moderated diperoleh nilai t hitung sebesar 0,513 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,513 < 1,984$), dan nilai signifikansi variabel interaksi antara variabel Sanksi Pajak (Z) terhadap Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (P2) adalah sebesar 0,609 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, yang menunjukkan bahwa Variabel Sanksi Pajak (Z) tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (P2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji F

Tabel 4. 14 Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	859,131	3	286,377	86,623	<,001 ^b
	Residual	317,379	96	3,306		
	Total	1176,510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Perpajakan_Y

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak_Z, Pengetahuan_Perpajakan_P1, Modernisasi_Sistem_Administrasi_Pajak_P2

Sumber: Data diolah oleh output SPSS

Berdasarkan tabel 4.14 maka hasil uji signifikan simultan (uji F) didapatkan hasil F hitung sebesar 86,623 dengan nilai F tabel sebesar 2,699. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($86,623 > 2,699$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,001 yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat Malingping)

(Ha) diterima dan hipotesis (H0) ditolak, yang menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji T

Tabel 4. 15 Uji T

		Coefficients^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	,807	1,548		,521	,603	
	Pengetahuan_Perpajakan_P1	,431	,063	,544	6,809	<,001	,441 2,270
	Modernisasi_Sistem_Administrasi_Pajak_P2	,140	,078	,146	1,795	,076	,422 2,367
	Sanksi_Pajak_Z	,248	,084	,248	2,945	,004	,395 2,533

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pemalakan_Y
Sumber: Data diolah oleh output SPSS

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.15 bahwa hasil variabel independen pengetahuan perpajakan (P1) diperoleh nilai t hitung sebesar 6,809 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($6,809 > 1,984$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,001 yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis (H0) ditolak, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artin (2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian oleh Wardani & Rumiyatun (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

*(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat
Malingping)*

Berdasarkan tabel 4.15 bahwa hasil variabel independen modernisasi sistem administrasi perpajakan (P2) diperoleh nilai t hitung sebesar 1,795 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,795 < 1,984$) dan nilai signifikan sebesar 0,076 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Setiawan (2016) pada KPP Pratama Badung Utara yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Taroreh (2024) bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan IBM SPSS 27, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara parsial, pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, dalam pengujian variabel moderasi, sanksi pajak terbukti mampu memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD SAMSAT Malingping.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, baik bagi wajib pajak maupun penelitian selanjutnya. Bagi wajib pajak atau masyarakat, diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepekaan terhadap kewajiban perpajakan guna mendukung pembangunan daerah, serta aktif

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat
Malingping)

memanfaatkan fasilitas digitalisasi layanan pajak yang telah disediakan oleh pemerintah. Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menggunakan metode pengumpulan data yang lebih komprehensif seperti observasi dan wawancara langsung, serta menambahkan variabel independen lain di luar penelitian ini mengingat koefisien determinasi menunjukkan masih terdapat sisa persentase pengaruh dari faktor lain. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman teoritis, khususnya terkait teori kepatuhan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R., Yuniar, R., & Idel, E. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i9.812>
- Alfianto, H. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Dinas Perhubungan Kota Cilegon). *Journal Of Management, Accounting, And Administration*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.52620/Jomaa.V1i1.90>
- Effiyaldi, Pasaribu, J. P., Suratno, E., Kadar, M., Gunardi, Naibaho, R., Hati, S. K., & Aryati, V. (2022a). Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2). <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jumanage>
- Farras, A., Hayati, H., Yuliana, V., Silvia, Rosini, I., & Kusumaningsih, A. (2025). Improving Tax Understanding For Msmes In The Waringinjaya Village, The Bojonggede Subdistrict, Bogor Regency. *The Future Of Education Journal*, 4, 5228–5233. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>
- Fasmi, L., & Misra, F. (2014). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1).
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsi, U., & Mais, R. G. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4). <https://doi.org/10.30651/Jms.V10i4.26407>
- Imron. (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada Cv. Meubele Berkah Tangerang. *Ijse – Indonesian Journal On Software Engineering*, 5(1).
- Kesuma, I. A. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(2), 2016. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Khasanah, A. F. (2020). Pengaruh Exterior, General Interior, Store Layout Dan Interior Display Terhadap Keputusan Pembelian Di Trio Wonosobo. *Journal Of Economic, Business And Engineering (Jebe)*, 1(2).
- Listyaningsih, E., & Hoyriyah, S. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (Jakpt) E Issn: 3025-9223*, 1(3).

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sektor Publik Dan Pemerintahan Di Samsat
Malingping)

- Lutfi, M., & Sari, I. R. (2026). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen (Jam)* Vol. 37 No. 1 (2026) Issn 2621-704x (Online) / 2621-7031, 37(1).
- Maharani, S., & Bernard, M. (2018). Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran. *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif*, 1(5).
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197.
- Milleani, A., & Maryono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13 No 1(1).
- Muhammad, R., Prayudyanto, M. N., & Syaiful. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan Bus Transjabodetabek Dengan Metode Uji Asumsi Klasik Dan Uji Regresi Linear Berganda. *Jurnal Seminar Nasional Ketekniksipilan*, 1(1).
- Rahmadani, R., & Akbar, I. R. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jorapi : Journal Of Research And Publication Innovation*, 1(3).
- Sari, S. R. N., Bahri, S., & Fitriani, N. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 252–263. <https://doi.org/10.59966/Ekalaya.V3i3.2059>
- Sugiyarti, L. (2017). Analisis Pengaruh Struktur, Prosedur Dan Strategi Organisasi Dalam Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Pesanggrahan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*.
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Jurnal Monex*, 8(2).
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.253>
- Yuesti, A., Prananta, N. G. W. S., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 7 No 1.
- Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business* (Vol. 8, Number 4).